



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MITRA DJAMAL
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 512206

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.952.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m²/120 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 605.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1050 m²/330 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 4.107.000.000
3. Tanah Seluas 256 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 256.000.000
4. Tanah Seluas 314 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 471.000.000
5. Tanah Seluas 342 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 513.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 305.400.000

1. MOTOR, VESPA LX SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 14.400.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
4. MOBIL, SUZUKI SUZUKI TM2FL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 135.038.215



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.392.838.215
III. HUTANG	Rp.	521.420.406
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.871.417.809

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.